PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)**

UNIT KERJA : **KANTOR REGIONAL VIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANJARMASIN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **A. DARMUJI**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **179175**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.933.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 351.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/41 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 199.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/216 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 902.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/42 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 301.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 89.650.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. LAINNYA, --- (SEPEDA) SEPEDA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 50.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
4. LAINNYA, --- (MESIN JAHIT, OBRAS DAN NECI) MESIN JAHIT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 100.000
5. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 12.625.000**

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	53.408.200
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	2.088.683.200
III.	HUTANG	Rp.	436.000.000
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.652.683.200

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.